

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Fea, Dyara Radhite Oryza. *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, (Yogyakarta: Legality, 2018).
- Gautama, Sudargo. *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993).
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2005).
- Huda, Ni'matul. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2013).
- Ismaya, Samun. *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Riyadi, Eko, dkk., *Vulnerable Groups Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012).
- Saleh, Wantijk. *Hak Anda atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Subardi. *Mengisi Rumah Kosong Polemik Seputar Rancangan Undang-Undang Kesitimewaan DIY*, (Yogyakarta: Nuansa Pilar Media, 2008).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Widodo, Tri. *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Navilla, 2000).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Rijkblad Paku Alaman Nomor 25 Tahun 1925

Rijkblad Kasultanan Nomor 6 Tahun 1962

Instruksi Wakil Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi

Jurnal

Fatimah, Nurul, dkk. "Kajian Yuridis tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak atas Tanah terhadap WNI Non Pribumi", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020.

Wardani, Widyarini Indriasti. "Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 15, Nomor 2, April 2018.

Artikel Ilmiah

Nowak, M. "Introduction to The International Human Rights Regime", *The Raoul Wallenberg Institute Human Rights Library*, Volume 14, Oktober 2003.

Website

Sinaga, Eri Komar. "Aturan di Yogya yang Tidak Mengizinkan Warga Keturunan Memiliki Hak Tanah", diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/19/ombudsman-ri-akan->

putusan-aturan-di-yogya-yang-tidak-mengizinkan-warga-keturunan-
memiliki-hak-tanah.

Suryani, B. " UU Keistimewaan DIY Diskriminasikan Kaum Tionghoa, Mahasiswa
UGM Gugat ke MK", diakses melalui
[https://kabar24.bisnis.com/read/20191119/15/1172139/uu-keistimewaan-diy-](https://kabar24.bisnis.com/read/20191119/15/1172139/uu-keistimewaan-diy-diskriminasikan-kaum-tionghoa-mahasiswa-ugm-gugat-ke-mk)
diskriminasikan-kaum-tionghoa-mahasiswa-ugm-gugat-ke-mk.

LAMPIRAN

- A. Melakukan wawancara dengan Ibu Retno selaku Kepala Bidang Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta



- B. Melakukan wawancara dengan Ibu Nur dari bagian Kasubag Hak dan Pendaftaran Tanah





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. KUSUMANEGARA No.161 Telp. (0274) 565587 FAX. (0274) 540871 email: kot-yogyakarta@atrpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: UP.02/1472.SKet-34.71/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Farrasa Naja Maisara
Nomor Mahasiwa : I1000118130560
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Diponegoro
Judul Skripsi : Implementasi Asas Persamaan Hak dalam Kepemilikan Tanah
Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Pasca
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 di Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset pada tanggal 14 September 2022
di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 15 September 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta


Rudi Prihantoro, A.Ptnh., M.M., M.H.
NIP.19690609 198903 1 002

